

**SUSTAINABILITAS PENGUSAHA KERAJINAN GERABAH DALAM
BINGKAI KEMISKINAN STRUKTURAL
(Studi Pada Desa Ouw Kecamatan Saparua)**

Ludwina Pormes¹⁾, Audry Leiwakabessy²⁾

^{1,2)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

^{1,2)}Alamat email : ludwina.pormes@gmail.com, audry.leiwakabessy@gmail.com*

ABSTRACT

Ouw Village is a one of the potential Village in Saparua sub-district, Central Maluku Regency. They are famous for their pottery crafts since the ancient times. However, their business did not have an experience significant development and the craftsmen are still classified as a poor society. The purpose of this research is to know the effect of structural poverty on the sustainability of pottery craftsmen in the Ouw Village. This research use descriptive qualitative method with ethnographic techniques. The results show that structural poverty affects the sustainability of the pottery business in Ouw Village due to several factors including: unbalanced regulations, product distribution channels, lack of promotion and lack of funds for business development.

Keywords: *sustainability, structural poverty*

ABSTRAK

Negeri Ouw merupakan salah satu negeri/desa potensial di kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. Terkenal dengan kerajinan gerabah yang sudah digeluti turun temurun oleh masyarakat di negeri tersebut. Namun sebaliknya usaha yang digeluti tidak mengalami pengembangan dan rata-rata pengrajin masih digolongkan sebagai masyarakat miskin pemicu keadaan tersebut disebabkan berbagai macam faktor sehingga pentingnya melakukan penelitian mengenai keberlanjutan pengusahaan gerabah di negeri Ouw. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan struktural terhadap sustainability pengrajin gerabah di negeri Ouw kecamatan Saparua. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik etnografi untuk menjelaskan secara mendalam mengenai pengaruh kemiskinan struktural terhadap keberlangsungan usaha gerabah. Hasil penelitian membuktikan bahwa kemiskinan struktural sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha gerabah di negeri Ouw disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : regulasi yang timpang dan tidak berpihak kepada wilayah kabupaten dan pedesaan, jalur distribusi produk yang harus melalui lautan dengan biaya transportasi yang tidak murah, minimnya promosi dan kurangnya modal untuk pengembangan usaha.

Kata kunci: *sustainability, kemiskinan struktural*

1.1 PENDAHULUAN

Berbicara mengenai keberlanjutan pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha searah dengan strategi pembangunan wilayah yang berorientasi pada upaya untuk memanfaatkan potensi, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam. Hal ini dianggap menarik, mengingat kondisi realitas pembangunan dewasa ini menunjukkan adanya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah (*Disparity Space*), terutama Jawa dan Luar Jawa, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk di Provinsi Maluku dengan tingkat kesenjangan cenderung meningkat ke arah 1 (Indeks Wiiliamson = 0,5 – 0,7) dan menduduki peringkat ke-empat daerah termiskin di Indonesia tahun 2022 dengan presentase kemiskinan 16,23%. Hal ini menunjukkan bahwa, adanya peningkatan jumlah penduduk belum tentu diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita atau dengan kata lain, terjadi distribusi pendapatan sangat timpang antar kabupaten di provinsi. Pada sisi lain, masih terdapat banyak kabupaten atau kota di KTI termasuk di Maluku belum siap memanfaatkan potensi sumber daya yang dikuasainya sesuai dengan preferensi dan skala prioritas masing-masing daerah agar mampu mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang maksimum.

Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang jika dimanfaatkan sangat membuka peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat terutama di pedesaan, baik melalui produksi hasil laut dan darat, maupun melalui pengolahan hasilnya menjadi berbagai aneka makanan serta juga berbagai kerajinan tangan. Tampaknya pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sebetulnya memiliki kemampuan dalam hal pengembangan dan pemberdayaan ekonomi produktif lokal, penciptaan pasar baru dan kepemimpinan inovasi, peningkatan ekspor daerah serta peranannya sebagai mesin pemacu ekonomi produktif. Namun sayangnya, hl ini belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah.

Pembangunan pedesaan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Namun demikian, karena sebahagian besar aktor utama pembangunan berkedudukan di perkotaan, mereka cenderung lebih mengutamakan pembangunan perkotaan ketimbang pedesaan. Namun demikian, penekanan pembangunan pedesaan pada pembangunan masyarakat secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap keterbelakangan masyarakat desa di bandingkan masyarakat kota. keterbelakangan masyarakat desa tidak semata karena keterbelakangan pendidikan, atau karena banyaknya jumlah pengangguran tak kentara, tapi juga karena masih cukup besarnya jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Negeri Ouw adalah desa yang berjarak 9 km dari kecamatan Saparua kabupaten Maluku Tengah propinsi Maluku. Negeri Ouw ini terletak di paling ujung tenggara pulau Saparua dengan luas desa 9,50 km² (5,38%), bersama 3 negeri tetangga yaitu negeri Sirisori Amalatu, negeri Sirisori Amapatti dan negeri Ullath. Jumlah kepala keluarga 473 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1.526 jiwa (4,33%), laki-laki 745 jiwa dan perempuan 781 jiwa. Beragam objek wisata yang dapat kita jumpai di negeri Ouw yang juga merupakan peninggalan sejarah leluhur yang tetap masih terpelihara hingga saat ini diantaranya kerajinan gerabah (budaya), goa liaano (kekayaan alam), pantai moloni (budaya), pantai nukawoni (bahari), dan benteng portugis (sejarah). Dari sisi pemberdayaan masyarakat dan roda perekonomian, mata pencarian rata-rata negeri Ouw adalah sebagai nelayan 25% dan petani 75%, hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat negeri Ouw bermata pencaharian pada sektor pertanian. Dari segi usaha, kios yang menjual sembilan bahan pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat berjumlah kurang lebih 20 kios, sisanya adalah pengarajin gerabah yang menjadi kerajinan tangan unggulan negeri Ouw.

Data di atas menunjukkan bahwa negeri Ouw merupakan negeri/desa yang potensial untuk dikembangkan, hal itu terlihat jelas dari beragam kerajinan, wisata maupun sumber daya alam yang melimpah. Banyaknya jumlah kios dan kelompok kerajinan juga merupakan suatu usaha masyarakat setempat dalam mempertahankan dan menopang kehidupan ekonomi mereka. Namun realitasnya masyarakat negeri Ouw masih terbelenggu dalam keterbatasan untuk mengembangkan kemampuan dari usaha-usaha yang sudah ada karena berbagai kendala sehingga masyarakat setempat hanya mampu mengolah hasil usaha mereka untuk diperdagangkan pada wilayah sekitar negeri Ouw saja. Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap fenomena yang ada dengan judul penelitian “Sustainability Pengusaha Kerajinan Gerabah Dalam Bingkai Kemiskinan Struktural” (Studi Pada Negeri Ouw Kecamatan Saparua)”.

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Kemiskinan Pedesaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005) arti miskin adalah tidak berharta benda atau serba kurang. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (Soekanto, 1993, hal 338-339) yang terjadi secara terus menerus dengan waktu relatif lama seiring dengan ritme kehidupan sehari-hari dan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, kesehatan, dan proses pengambilan keputusan. Kemiskinan dapat terjadi karena unsur budaya (internal dan eksternal) atau akibat dari keadaan luar biasa (misalnya bencana atau musibah).

Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta-benda” (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Menurut Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan :

“Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Kemiskinan dalam prespektif ekonomi, didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Kemiskinan ini menggunakan indikator yang sifatnya materi seperti kepemilikan harta benda, income perkapita, maupun konsumsi sebagaimana BPS menggunakan indikator konsumsi sebesar 21,00 kalori perorang setiap hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu. Contoh kemiskinan ini adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan beserta akses lain, seperti kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.

Kemiskinan tidak hanya menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan tetapi kemiskinan juga menggambarkan tingkat taraf hidup masyarakat yang rendah. Hal tersebut di karenakan oleh kecilnya jumlah pendapatan

sehingga tidak semua kebutuhan pokok terpenuhi. Kemiskinan menurut akibatnya secara umum di bedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. ***kemiskinan natural*** adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya
2. ***kemiskinan kultural*** adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan pada suatu masyarakat
3. ***kemiskinan struktural*** adalah kemiskinan yang disebabkan oleh buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi nasional yang lebih menguntungkan daerah atau wilayah tertentu.

Sebagaimana terjadi pada kelompok masyarakat lainnya di dunia, kemiskinan natural adalah sesuatu yang tidak dapat dielakan, karena kemiskinan natural terjadi disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki baik SDA maupun SDM misalkan si miskin sejak dari lahirnya cacat ataupun keterbelakangan mental yang membatasinya untuk mengembangkan diri dan tetap dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas dan enggan bekerja keras, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, adanya kebiasaan hidup boros, tidak disiplin, tingkat pendidikan rendah dan sebagainya. Ciri dari kemiskinan kultural adalah masyarakat tidak mau mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Pandangan lain tentang kemiskinan kultural adalah merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggapi masyarakat terlalu lama, sehingga membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir.

Di pihak lain tidak dapat dibantah bahwa faktor-faktor struktural juga memainkan peranan yang sangat penting dalam proses penciptaan kesenjangan dan kemiskinan Indonesia. Pelaksanaan pembangunan yang terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi selama ini, di satu sisi telah menyebabkan terabaikannya upaya-upaya serius untuk menanggulangi kesenjangan dan kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Pihak yang berperan besar dalam terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jikapun ada lebih berorientasi pada proyek bukan pada pembangunan kesejahteraan. Oleh karenanya masyarakat miskin tetaplah menjadi miskin karena tidak ada upaya dalam meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan ketiga macam kemiskinan tersebut, dapat diketahui berbagai penyebab kemiskinan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia.

Kemiskinan Struktural

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang terlalu mementingkan pertumbuhan, di satu sisi telah menyebabkan terabaikannya upaya-upaya serius untuk menanggulangi kesenjangan. Sebagaimana di ketahui, sumber utama kesenjangan ekonomi antara Jakarta dan pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya adalah sentralisasi pengumpulan penerimaan negara yang sangat berlebihan di tangan pemerintah pusat. Pada sisi penerimaan, sekitar 95% penerimaan negara di kumpulkan oleh pemerintah pusat. Sementara pada sisi belanja, belanja negara dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat meliputi sekitar 80%. UU No. 25 tahun 1999 yang di terbitkan oleh pemerintah, secara substansial tidak banyak mengubah keadaan. Sebab berdasarkan UU tersebut, walaupun volume belanja negara yang akan didaerahkan meningkat dari sekitar 20% menjadi 35%, pengumpulan sekitar 95% penerimaan negara akan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat (Baswir 1999).

Akhirnya bersamaan dengan lemahnya struktur pengawasan, orintasi pertumbuhan yang berlebihan itu juga telah menyebabkan semakin marajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibat KKN yang terjadi antara sektor perbankan dengan perusahaan-perusahaan konglomerasi misalnya tidak hanya penyaluran kredit cenderung terkonsentrasi kepada grup-grup perusahaan tersebut. Karena hal itu di ikuti pula oleh munculnya persoalan kredit macet, maka peluang untuk menanggulangi kemiskinan cenderung semakin terbatas.

Kondisi tersebut jelas mengungkapkan cukup besarnya peranan faktor struktural dalam meperburuk situasi kemiskinan di Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan yang hanya bersifat karitatif dan parsial, selain sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, mustahil dapat menanggulangi persoalan itu secara efektif. Dengan kata lain, ditempuhnya pendekatan struktural dalam menanggulangi kemiskinan, termasuk upaya untuk secara bersungguh-sungguh memerangi KKN sudah semestinya mendapat perhatian. Jika tidak, situasi kemiskinan yang melanda daerah pedesaan akan cenderung semakin parah.

Realitas ini menjadi bumerang bagi pengembangan masyarakat, di satu sisi masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan diri dengan pengolah sumber daya alam dalam bentuk kerajinan tangan ataupun bahan

produksi lain namun di satu sisi struktur pemerintahan yang membatasi mereka hingga tidak mampu berkembang, timpangnya regulasi yang bias pengembangan masyarakat, tidak adanya campur tangan pemerintah berupa pendampingan dan bantuan dana yang timpang memungkinkan masyarakat terus dalam roda kemiskinan yang tak berujung.

2.1.2 Sustainabilitas Pengusaha Kecil

Menurut Schaltegger dan Wagner (2011), "Current definition for sustainable entrepreneurship focus on new solutions or sustainable innovations that aim at the mass market and provide value to society. entrepreneurs or individuals or companies that are sustainability driven within their core business and contribute towards a sustainable development can be called sustainable entrepreneurs."

Menurut Porter dan Kramer (2011), "Sustainable entrepreneurship stand for a unique concept of sustainable business strategies that focuses on increasing social as well as business value - shared value - at the same time." "cause which aims to solve problems related to the sustainability agenda and also to create social and environmental sustainability."

Ada 3 poin penting menurut Abrahamsson (2007) dalam Sustainable Entrepreneurship :

1. Sustainable Entrepreneurship menemukan dan membuat inovasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah keberlanjutan.

2. Sustainable Entrepreneurship berarti untuk mendapatkan solusi ke pasar melalui pengorganisasian yang kreatif

3. Sustainable Entrepreneurship dalam proses menambah nilai keberlanjutan dengan melihat sistem pendukung kehidupan.

Dengan demikian, Sustainable Entrepreneurship adalah kegiatan membangun dan menjalankan bisnis dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya yang ada untuk digunakan baik untuk masa kini maupun di masa depan.

Penanggulangan masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1999). Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyarakat (Mc Whirter, E.H., 1991; Friedman John, 1992). Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang cukup inovatif adalah the Sustainable Livelihood Approach (SLA), yang pada dasarnya upaya pelibatan (partisipasi) masyarakat untuk belajar dan beraktivitas secara berkelanjutan dengan cara unik mereka menjalani hidup dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut Oliver Serrat (2008), the sustainable livelihood approach (SLA) is the process by which rural families construct a diverse portfolio of activities and social support capabilities in their struggle for survival and in order to improve their standards of livings. Hal ini didukung oleh Shadi Hamadeh (2009), yang menyatakan EDKZD. The sustainable livelihoods approach is a way of thinking about the objectives, scope, and priorities for development activities. Di sisi yang lain, pemberdayaan komunitas secara prinsip harus memperhatikan budaya lokal masyarakat. Budaya lokal Bali pada hakekatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali juga memiliki identitas yang jelas yaitu budaya ekspresif yang termanifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai-nilai dasar yang dominan seperti: religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni, dan nilai keseimbangan. Dengan pendekatan SLA (the sustainable livelihood approach), proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. Proses partisipatif menggunakan model Dick, dimana tingkat partisipasi dibedakan menjadi tujuh, tergantung dari jenis kegiatan atau sub kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan partisipasi yaitu partisipasi sebagai: informan, interpreter, planner, implementor, fasilitator, researcher atau co-researcher, resipien information.

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap process, outcome, dan stakeholder. Potensi wilayah merupakan modal sosial-ekonomi-politik, sumber alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) suatu desa akan menjadi modal dasar program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Program pembangunan yang dicanangkan di suatu wilayah seyogyanya mengoptimalkan dan memberdayakan potensi wilayah mengacu pada kearifan lokal masyarakat setempat untuk menjaga keharmonisan dan sinkronisasi derap langkah pembangunan menuju perwujudan desa mandiri yang berakar pada potensi wilayahnya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Di pihak lain, kearifan lokal (local wisdom) dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup. Kearifan lokal Bali pada hakekatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan (rwa bhineda), yang sering ditentukan oleh faktor ruang (desa), waktu (kala) dan kondisi riil di lapangan (patra). Perbedaan dalam dinamika masyarakat Bali diakui karena adanya faktor desa, kala dan patra. Masyarakat Bali sesungguhnya menjunjung

tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), hubungan sesama manusia (pawongan), dan hubungan manusia dengan lingkungan (palemahan), yang tercermin dalam ajaran Tri Hita Karana. Selain nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi, dalam masyarakat Bali juga dikenal adanya konsep tri semaya yakni persepsi orang Bali terhadap waktu. Menurut orang Bali masa lalu (athita), masa kini (anaghata) dan masa yang akan datang (warthamana) merupakan suatu rangkaian waktu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kehidupan manusia pada saat ini ditentukan oleh hasil perbuatan di masa lalu, dan perbuatan saat ini juga menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Dalam ajaran hukum karma phala disebutkan tentang sebab akibat dari suatu perbuatan, perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik.

2.3 Kajian Studi Empiris

2.3.1 Kemiskinan

Penelitian yang berhubungan dengan kemiskinan sudah banyak dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai beraneka ragam teori telah berupaya mencari penjelasan mengapa terjadi proses kemiskinan. Secara garis besar, kemiskinan dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alamiah (Nasution, 1996). Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga mencakup masalah aturan permainan yang diterapkan. Kemiskinan kultural lebih menjurus kepada budaya dan keadaan setempat dimana pengaruh keterbatasan modal, pendidikan dan kurangnya etos kerja serta pola konsumsi yang berlebihan mempengaruhi hingga tidak berkembang, sedangkan kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Pada kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah. Beranjak dari ketiga tipe kemiskinan itu, berbagai teori telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerhati masalah kemiskinan. Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosio-antropologi, khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias ke perkotaan, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya perangsang untuk penanaman modal. Disisi lain, pendekatan sosio –antropologis menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural).

Di sisi lain terdapat pandangan proses kemiskinan sebagai akibat kebijakan yang bias perkotaan. Lipton dan Vyas (1981) mengajukan konsep ‘urban bias’ dalam menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan di negara sedang berkembang. Menurut Lipton dan Vyas: “*Small, interlocking urban elites –comprising mainly businessmen, politicians, bureaucrats, trade-union leaders and supporting staff of professionals, academics and intellectuals – can in a modern state substantially control the distribution of resources*”. Bias perkotaan ini dipercaya oleh Lipton, karena menurutnya memang terdapat antagonisme antara penduduk pedesaan dan perkotaan, dimana yang pertama ditandai dengan kemiskinan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pembangunan yang hanya diarahkan ke perkotaan akan mengakibatkan semakin memburuknya kehidupan penduduk miskin di pedesaan. Untuk mengatasi kecenderungan yang negatif seperti itu, Lipton berpendapat bahwa negara sedang berkembang seharusnya mengarahkan kegiatan investasinya ke sumberdaya utama yang mereka miliki yakni pertanian yang padat karya (labour intensive).

Dalam rangka dukungannya untuk mengurangi bias perkotaan, Lipton dan Vyas berpendapat bahwa sektor pedesaan adalah “pengguna investasi terbatas” yang lebih responsif dari pada sektor perkotaan. Sejauh ini gagasan Lipton tersebut telah mendapat banyak kritik namun juga dukungan dikalangan pemerhati masalah ekonomi pembangunan.

2.3.2 Hubungan antara kemiskinan struktural dan sustainabilitas pengusaha kecil

Realitas kemiskinan pedesaan menjadi polemik yang berkepanjangan karena hingga saat ini belum adanya metode yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dampak kemiskinan struktural terhadap sustainabilitas pengusaha kecil didasari oleh regulasi pemerintah yang timpang dimana pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara ruang kota dan ruang desa. Pemerintah lebih fokus terhadap pembangunan perkotaan dan tanpa disadari mendiskriminasi pembangunan pedesaan. UU No. 25 tahun 1999 yang di terbitkan oleh pemerintah, secara substansial tidak banyak mengubah keadaan. Sebab berdasarkan UU tersebut, walaupun volume belanja negara yang akan di daerahkan meningkat dari sekitar 20% menjadi 35%, pengumpulan sekitar 95% penerimaan negara akan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya secara tidak langsung struktur pemerintah

sebenarnya membatasi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk mengelola usahanya sehingga masyarakat pedesaan tetap terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan.

3. METODOLOGI

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan analisa kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan secara mendalam penyebab kemiskinan struktural yang berdampak pada keberlanjutan pengusaha kerajinan gerabah di negeri Ouw, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisa dampak kemiskinan struktural terhadap keberlanjutan pengusaha kerajinan Gerabah di negeri Ouw dengan menggunakan model pertumbuhan ekonomi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di negeri Ouw Kecamatan Saparua (Pulau-pulau Lease), Provinsi Maluku. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa negeri Ouw merupakan salah satu negeri/desa di Kecamatan Saparua yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat baik jika dikembangkan ke depan serta pertimbangan lainnya desa Ouw sudah sejak lama terkenal dengan penghasil gerabah terbaik di wilayah Maluku namun hingga saat ini tidak berkembang.

3.3. Jenis Data Penelitian

Jenis pengumpulan data dilakukan dengan 2 bentuk yaitu :

1. Data Primer

Jenis data dengan cara dilakukannya wawancara, pembuatan pedoman wawancara, observasi yang dilakukan peneliti.

2. data sekunder

Jenis data dengan cara menyalin data-data sekunder dari kepustakaan yang tersedia terkait dengan masalah yang diteliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas beberapa bagian :

1. Wawancara dengan informan Kunci

Penulis memilih wawancara dengan informan kunci karena wawancara merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil wawancara tersebut akan terjelma dalam bentuk transkrip dan matrix untuk memudahkan dalam proses penulisan laporan penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Tujuan pokok penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi. Melalui pengamatan ada kemungkinan untuk melihat dan mengamati sendiri proses yang berlangsung dan kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Selain itu juga dengan melakukan pengamatan, peneliti dapat melihat hal-hal yang tidak dapat disampaikan subyek secara verbal sehingga penulis dapat lebih memahami keadaan yang sebenarnya. Data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif, dengan melalui tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil dokumentasi-dokumentasi (seperti video atau foto) sebagai faktor pendukung terhadap data yang telah dikumpulkan dengan metode lainnya

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini sebagai berikut adalah analisa kualitatif, secara detail awalnya akan dilakukan pemilahan dan pengelompokan data serta membuat catatan yang dianggap penting selama pengumpulan data. Kemudian penyajian data dengan cara yang dianggap sesuai dan dapat mendeskripsikan sehingga dapat di interpretasikan. Dari tahap itu, ditarik kesimpulan dengan cara menemukan pola dan sajian data yang telah disusun. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara kualitatif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya, relevan dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Regulasi yang timpang dan tidak berpihak kepada wilayah kabupaten dan pedesaan

Kerajinan desa Ouw adalah kerajinan gerabah, Kabupaten Maluku Tengah. Kerajinan hasil warisan leluhur yang digeluti warga desa setempat. Nyaris punah, namun kemudian bangkit kembali, setelah ada campur tangan salah satu Yayasan asal Belanda berupa penyalurkan sejumlah bantuan. Kerajinan gerabah merupakan potret budaya yang masih diwarisi dari generasi ke generasi. Namun, hingga saat ini usaha kerajinan gerabah tidak mengalami pengembangan yang membantu para kelompok usaha pengrajin ini keluar dari lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan paparan di atas muncul pertanyaan : *sampai sejauh mana upaya percepatan pembangunan melalui pengelolaan potensi di negeri Ouw menuju keberlanjutan usaha yang mengalami pengembangan dan mampu bersaing dengan produk yang kompetitif?*

TENCI TOMASOA seorang pengrajin gerabah berumur 45 tahun duduk di sudut rumahnya sambil memandang ke arah seberang. Ibu enam anak ini, baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Tiga buah gerabah telah siap untuk dikeringkan. Lalu kami adalah dalam sesi wawancara yang lebih tepat dikatakan kami bercerita mengenai pengembangan usaha gerabah ke depan. Menurut penuturan Ibu Tenci :

Sakarang(sekarang) ini jual katong (kami) pung(punya) kerajinan tangan su (sudah) susah par (untuk) orang bali (beli). Kecuali ada acara di Saparua baru orang-orang datang lia (lihat) jualan ni kaseng (atau tidak) katong pi (kita pergi) jual di pasar Saparua. Su amper (sudah hampir) satu bulan ni seng (ini tidak) ada yang pesan atau datang bali (beli) jadi ibu-ibu ni tamu pertama dalam bulan ini yang datang lia (lihat)

Kondisi ini menggambarkan makin surutnya usaha kerajinan gerabah yang digeluti warga negeri Ouw. Padahal gerabah hasil produksi warga setempat, pernah menembus pasar luar negeri diantaranya ke Negeri Kincir Angin (Belanda). Ibu Tince boleh dikatakan merupakan generasi ketiga yang menempuh profesi sebagai pembuat gerabah di desa yang letaknya sembilan kilo meter dari kecamatan Saparua. Ibu Tince baru delapan tahun menekuni profesi sebagai pembuat gerabah, dengan sedikit bekal yang diwariskan para leluhurnya, dia terus mengasah kemampuannya mengolah gumpalan tanah liat menjadi berbagai barang hiasan dan peralatan dapur. Sayangnya, hasil kesibukannya itu kerap kali harus terhenti, karena kering orderan.

Tanah liat di beli dari warga setempat, harganya pun cukup terjangkau. Untuk satu karung plastik ukuran 25 kilo gram, biasanya dihargai Rp 10 ribu. Tanah liat sebanyak itu bisa digunakan untuk membuat gerabah sebanyak belasan buah, tergantung ukuran; bila ukurannya besar biasanya membutuhkan tanah liat yang banyak sehingga yang menjadi kendala saat ini hanya masalah pasar yang tak menentu, di tambah dengan peralatan yang belum memadai dikarenakan kurang adanya pendampingan dan bantuan peralatan pengrajin gerabah padahal potensi kerajinan gerabah yang digelutinya cukup menjanjikan. Sejauh ini para pengrajin di bantu oleh yayasan Titane dari negara Belanda, bantuan dari yayasan itu berupa meja putar sebanyak tiga unit yang biasanya di pakai untuk mengolah tanah liat menjadi barang yang diinginkan. Selain kendala pasar di negeri Ouw juga terdapat sekitar belasan kelompok kerajinan yang menekuni bidang ini, otomatis terdapat persaingan dalam pemasaran hasil kerajinan mereka. Mereka di bentuk atas permintaan pemerintah daerah lewat dinas terkait guna mempermudah penyaluran bantuan dalam peningkatan usaha yang diwarisi para leluhur mereka menjadi home industry. Namun salah satu kelemahan pemerintah daerah untuk pengembangan usaha kerajinan gerabah adalah kurangnya promosi pemerintah daerah akan hasil karya mereka sehingga membuat usaha kerajinan gerabah di negeri itu hanya berjalan seadanya, untuk menyambung hidup.

Hasilnya untuk keperluan keluarga saja, karena memang sulit untuk dikembangkan lebih maju, bila kurang adanya campur tangan pemerintah. Jika dibandingkan para perajin gerabah di negeri Ouw memang tidak sebagus dengan para pengrajin gerabah di Pulau Jawa. Selain terkendala dengan masalah pasar, gerabah buatan masyarakat desa Ouw harganya terbilang cukup murah contohnya sebuah pot anggrek, hanya dihargai sebesar Rp.7.500,- sehingga hasil karya itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini tentunya sangat berbeda jauh, bila dibandingkan dengan perajin di Pulau Jawa yang mematok harga diatas Rp.50.000,- per buah dikarenakan perajin di Pulau Jawa memiliki akses pasar yang sangat menjanjikan, kemudian dibantu dengan campur tangan pemerintah yang cukup, dalam hal pembinaan dan pelatihan, kemudian ditambah bantuan berupa peralatan dan inovasi produk.

Sejarah pembuatan gerabah di negeri Ouw kecamatan Saparua memang sudah tersohor hampir di seantero daerah Maluku karena dulunya para leluhur di negeri Ouw sudah memiliki kepandaian mengolah tanah liat menjadi berbagai jenis peralatan rumah tangga. Kini home industry yang memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat desa dan juga mampu mendatangkan pendapatan bagi daerah, bila tidak dikeloala dengan maksimal akan terancam punah, dikarenakan tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Menyikapi persoalan pelik ini, Tince dan perajin setempat hanya bisa berharap, agar suatu saat hasil produksi gerabah yang dilakoni mampu kembali menembus pasar di tingkat nasional bahkan internasional. Apalagi, makin kondusifnya daerah Maluku pascakonflik ini.

Realitas ini menjadi bumerang bagi pengembangan masyarakat, di satu sisi masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan diri dengan pengolah sumber daya alam dalam bentuk kerajinan tangan ataupun bahan produksi lain namun di satu sisi struktur pemerintahan yang membatasi mereka hingga tidak mampu berkembang, timpangnya regulasi yang bias pengembangan masyarakat, tidak adanya campur tangan pemerintah berupa pendampingan dan bantuan dana yang timpang memungkinkan masyarakat terus dalam roda kemiskinan yang tak berujung.

4.2 Jalur distribusi produk dan transportasi

Propinsi Maluku di kenal dengan daerah kepulauan, hal ini disebabkan oleh wilayah lautan mendominasi wilayah daratan. Sebagian besar wilayah Maluku berbentuk kepulauan sehingga jika akan melaksanakan perjalanan di wilayah Maluku haruslah menggunakan transportasi lautan dan menempuh jarak yang cukup jauh. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat jalur distribusi pemasaran kerajinan gerabah di negeri Ouw. Jalur transportasi yang digunakan biasanya dalam bentuk kapal cepat dan speedboat. Jika dari negeri Ouw menuju pelabuhan penyeberangan harus menggunakan kendaraan umum, baik mobil angkutan ataupun motor ojek dengan biaya perorang kurang lebih 20ribu perorang. Setelah itu barulah menggunakan transportasi laut yang

ditempuh menuju kota Ambon kurang lebih 1,5 jam, dan mengeluarkan biaya per orang kurang lebih 100ribu setelah kapal cepat atau speedboat tiba di pelabuhan Tulehu selanjutnya menuju kota Ambon dengan biaya transportasi 20ribu perorang dengan pemakaian waktu kurang lebih 1,5 jam. Setelah itu barulah dipasarkan produk tersebut. Berdasarkan penjelasan ini maka dapat di lihat jalur distribusi yang sangat lama dan berbelit-belit. Hal inilah yang menjadi penghambat para pengrajin gerabah untuk dapat mendistribusikan hasil kerajinannya. Berikut penuturan salah seorang pengrajin gerabah di negeri Owu.

Biasanya katong (kami) jual di dalam negeri ni (ini) saja, kalau paling jauh katong jual di pasar Saparua. Karna (karena) kalau mau pi (pergi) jual di Ambon biaya talalu basar (terlalu besar) katong seng dapa untung (kami tidak dapat keuntungan) kecuali kalau ada yang pesan dari Ambon barulah katong (kami) bawa ke Ambon.

Penuturan Ibu Mery, biasanya gerabah yang kita produksi dijual keluar kecamatan Saparua misalnya ke Pulau Ambon dan sekitarnya, namun itu bisa kita lakukan bila ada pesanan atau orderan. Apalagi, untuk memasarkan hasil produksi ke kota Ambon, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan para perajin, sehingga ancaman terhentinya produksi gerabah di desa tersebut makin kelihatan.

Dari fenomena tersebut maka para pengrajin gerabah di desa Owu bukanlah dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin natural maupun miskin kultural namun merupakan masyarakat pedesaan yang dikategorikan miskin secara terstruktur. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Pihak yang berperan besar dalam terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jikapun ada lebih berorientasi pada proyek bukan pada pembangunan kesejahteraan. Oleh karenanya masyarakat miskin tetaplah menjadi miskin karena tidak ada upaya dalam meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan juga akses untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi alam yang ada di sekitar untuk menjadi produk lokal yang memiliki nilai jual dan pasar.

4.3 Minimnya promosi dan kurangnya modal usaha.

Dalam menjalankan usaha unsur promosi menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam meningkatkan keuntungan usaha yang akhirnya dapat mampu mengembangkan usaha. Dari kekuatan promosi para pemilik usaha dapat memprediksi keberlangsungan suatu usaha. Fenomena yang terjadi pada pengrajin di negeri Owu selama ini adalah mereka belum pernah melakukan promosi bahkan mereka masih sangat awam dengan istilah promosi. Mengapa demikian? Karena usaha kerajinan gerabah merupakan usaha turun temurun sehingga sifatnya melanjutkan apa yang sudah diwariskan dari para leluhur. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang pengrajin gerabah di negeri Owu. menurut Ibu Yomi :

Katong ni (kami ini) cuman bikin (membuat) kerajinan saja dan katong seng (kami tidak) pernah pi bajalang (mempromosikan) jual akang (barang kerajinan) par (untuk) orang-orang. Beta jua seng (saya juga tidak) tahu yang dong (mereka) bilang promosi tu (itu) karena dari dolo (dulu) katong (kami) cuman tau bikin (tahu membuat) kerajinan ni (ini) saja lalu kalau ada orang pesan katong (kami) kirim kalau ada yang mau beli langsung datang kaseng (atau tidak) katong (kami) jual di pasar saparua saja.

Berdasarkan penuturan Ibu Yomi terlihat jelas bahwa usaha gerabah ini sama sekali belum pernah dipromosikan oleh para pengrajin gerabah. Sebenarnya pernah pemerintah propinsi membentuk kelompok usaha yang akan di giring menjadi usaha home industry namun kenyataannya hingga saat ini kelompok usaha hanya di bentuk tanpa adanya pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha; sehingga para pedagang hanya berjalan dengan usahanya yang statis dan tidak ada pengembangan. Mereka tidak mampu menemukan strategi usaha yang tepat. Usaha kerajinan hanya bersifat usaha warisan yang membantu menyambung hidup para pengrajinnya. Disinilah letak kelemahan terstruktur yang mengakibatkan munculnya kemiskinan struktural. Para bagian ini pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten harus mampu mencari solusi pengembangan usaha sehingga para pengrajin dapat mengembangkan usaha mereka dan terhindar dari lingkaran kemiskinan.

Hal lain yang menjadi pemicu usaha kerajinan gerabah tidak berkembang karena kurangnya modal usaha. Padahal di kecamatan Saparua ada beberapa bank pemerintah dan bank daerah yang menyediakan pinjaman KUR (kredit usaha rakyat). Namun para pengrajin ini tidak diakomodir sehingga keterbatasan dana menjadi salah satu pemicu para pengrajin tidak mampu mengembangkan usahanya.

Dari 3 faktor pemicu kemiskinan struktural di negeri Owu kecamatan Saparua semuanya bermuara pada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga mencakup masalah aturan permainan yang diterapkan. Pada titik ini, sebenarnya tak bisa disangkal bahwa kemiskinan struktural yang terjadi pada para pengrajin gerabah di negeri Owu tidak terlepas dari adanya sentilan kemiskinan kultural dan natural namun yang sangat mendominasi pada fenomena pengrajin gerabah di negeri Owu adalah kemiskinan struktural. Sehingga pada

bagian inilah Penanggulangan masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1999). Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyarakat (Mc Whirter, E.H.,1991; Friedman John, 1992). Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang cukup inovatif adalah the Sustainable Livelihood Approach (SLA), yang pada dasarnya upaya pelibatan (partisipasi) masyarakat untuk belajar dan beraktivitas secara berkelanjutan dengan cara unik mereka menjalani hidup dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut Oliver Serrat (2008), the sustainable livelihood approach (SLA) is the process by which rural families construct a diverse portfolio of activities and social support capabilities in their struggle for survival and in order to improve their standards of livings. Hal ini didukung oleh Shadi Hamadeh(2009), yang menyatakan EDKZD. The sustainable livelihoods approach is a way of thinking about the objectives, scope, and priorities for development activities.

Harapan ke depan terhadap keberlangsungan pengusaha kerajinan gerabah adalah dengan pemberdayaan potensi wilayah yang ada di negeri Ouw, salah satu potensi yang harus dikembangkan dan tetap dipelihara adalah kerajinan gerabah. Kerajinan gerabah merupakan usaha turun temurun yang telah diwariskan dari para leluhur dan tetap terjaga hingga saat ini karena akses untuk mendapatkan bahan mentah pengolahan gerabah tepat berada di negeri Ouw hanya saja usaha ini tidak mengalami pengembangan dibandingkan dengan usaha gerabah yang di kelola oleh pengrajin gerabah di wilayah Jawa dan sekitarnya sehingga hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar dapat menciptakan keadilan absolut dimana daerah pedesaan seperti negeri Ouw perlu mendapatkan perhatian khusus untuk pengembangan kelompok usaha.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari 3 faktor pemicu kemiskinan struktural di negeri Ouw kecamatan Saparua semuanya bermuara pada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga mencakup masalah aturan permainan yang diterapkan. Pada titik ini, sebenarnya tak bisa disangkal bahwa kemiskinan struktural yang terjadi pada para pengrajin gerabah di negeri Ouw tidak terlepas dari adanya sentilan kemiskinan kultural dan natural namun yang sangat mendominasi pada fenomena pengrajin gerabah di negeri Ouw adalah kemiskinan struktural.

Hasil penelitian membuktikan bahwa kemiskinan struktural sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha gerabah di negeri Ouw disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : regulasi yang timpang dan tidak berpihak kepada wilayah kabupaten dan pedesaan, jalur distribusi produk yang harus melalui lautan dengan biaya transportasi yang tidak murah, minimnya promosi dan kurangnya modal untuk pengembangan usaha.

5.2. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat juga meneliti faktor kemiskinan natural dan kemiskinan kultural yang mempengaruhi sustainabilitas pengusaha kecil
2. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten agar dapat merancang regulasi yang berpihak pada pembangunan desa. Dan bersinergi untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi pedesaan dengan tujuan menekan tingkat kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

Baswir, 1999 *Akuntansi Pemerintahan Indonesia / Revisi EDISI, Edisi 3* ; Penerbitan, Yogyakarta.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.682>

<https://blog.olahkarsa.com/3-strategi-bagi-perusahaan-dalam-menerapkan-creating-shared-value/>

[https://www.researchgate.net/publication/277234335 Sustainablepreneurship Business with a Cause Conceptualizing Entrepreneurship for Sustainability](https://www.researchgate.net/publication/277234335_Sustainablepreneurship_Business_with_a_Cause_Conceptualizing_Entrepreneurship_for_Sustainability)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2005). *Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan.*

<model-pemberdayaan-masyarakat-miskin-dengan-the-sustainable-livelihood-approach.pdf.neliti.com>

Pormes L, 2009, *Buku Involusi Usaha Ikan Asar*,hal 58-77

[Poerwadarminta W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta](#)

Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

2.2 KAJIAN STUDI EMPIRIS

<https://investor.id/opini/19770/kaum-urban-dan-sinyal-kegagalan-negeri-agraris>

Nasution, 1996, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta